



## PENGARUH BELANJA, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH

Lina Widya Anggraini<sup>a\*</sup>, Desy Nur Pratiwi<sup>b</sup>, M. Hasan Ma'ruf<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Prodi Akuntansi, [anggrainiwidya350@gmail.com](mailto:anggrainiwidya350@gmail.com), ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

<sup>b</sup> Prodi Akuntansi, [desynurpratiwi692@gmail.com](mailto:desynurpratiwi692@gmail.com), ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

<sup>c</sup> Prodi Akuntansi, [hasan.stie.aas@gmail.com](mailto:hasan.stie.aas@gmail.com), ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

\* Korespondensi

### ABSTRACT

*This research aims to determine the effect of government spending, local revenue, and unemployment rate on the human development index of Central Java Province in 2021 – 2023. This research uses quantitative methods with a total of 105 data, obtained from 35 districts / cities in Central Java Province over a three-year period, namely 2021 to 2023. The data was tested using SPSS 23, using data analysis, namely descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing using multiple linear regression analysis, F test, t test and coefficient of determination test. The results showed that variable government spending and local revenue has significant effect for human development index. While variable unemployment rate has no significant effect for human development index.*

**Keywords:** *government spending, human development index, local revenue, unemployment rate*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 – 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah data sebanyak 105, yang diperoleh dari 35 kab/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode tiga tahun, yaitu 2021 hingga 2023. Data diuji menggunakan SPSS 23, menggunakan analisis data yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah dan pendapatan asli berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

**Kata Kunci:** Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Pengangguran

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Menurut United Nations Development Programme (2024) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran paling komprehensif untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia yang mencakup tiga aspek utama: pendidikan, standar hidup yang layak, dan kesehatan serta harapan hidup yang panjang, dengan demikian IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan pemerataan hasil pembangunan.

Belanja daerah adalah alat fiskal utama pemerintah daerah untuk merealisasikan pelayanan publik dan pembangunan. Semakin besar belanja pemerintah pada sektor-sektor yang relevan, maka semakin besar

pula peluang peningkatan IPM, karena kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih optimal. Sebaliknya, belanja pemerintah yang rendah atau tidak efisien dapat menghambat pencapaian pembangunan manusia yang merata.

Pendapatan Asli Daerah yang besar menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki kemandirian dalam keuangan. Semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin berpengaruh pada kemampuan daerah untuk menetapkan prioritas pengembangan, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan aspek utama IPM. Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia. Pengangguran yang berkepanjangan menghambat peningkatan produktivitas dan menurunkan insentif untuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, rendahnya pengangguran mencerminkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan produktif yang berdampak positif pada kesejahteraan dan peningkatan IPM.

Salah satu provinsi paling besar di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam pembangunan manusianya. Berdasarkan data BPS, IPM Jawa Tengah mencapai 73,39 pada tahun 2023, meningkat dari 72,17 pada tahun 2021. Namun demikian, meskipun terjadi kenaikan, angka ini masih berada di bawah IPM nasional sebesar 74,39. Di sisi lain, angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah menurun dari 5,95% di tahun 2021 menjadi 5,13% di tahun 2023. Adapun PAD mengalami peningkatan, dari Rp14,7 triliun (2021) menjadi Rp17 triliun (2023), begitu pula dengan belanja daerah yang meningkat dari Rp23,95 triliun (2022) menjadi Rp25,79 triliun (2023). [2]

Meskipun indikator-indikator tersebut menunjukkan tren positif, kesenjangan antar kabupaten/kota dalam IPM dan pengangguran masih cukup tinggi. Beberapa wilayah seperti Kota Semarang, Salatiga dan Surakarta menunjukkan indeks pembangunan manusia jauh di atas rata-rata provinsi, sedangkan daerah lain seperti Kabupaten Banjarnegara, Pemalang dan Brebes masih tertinggal. Hal ini menandakan adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan yang dapat disebabkan oleh distribusi belanja daerah yang kurang efektif atau kapasitas fiskal daerah yang rendah. Periode 2021 – 2023 dipilih karena merupakan masa transisi penting dari pandemi menuju pemulihan ekonomi. Tahun-tahun ini juga menjadi momen refleksi kebijakan fiskal daerah yang diuji efektivitasnya dalam kondisi krisis.

Beberapa studi sebelumnya telah dikerjakan oleh Sutono *et al.* (2022), Rosmadayanti *et al.* (2021), serta Setiawan & Fikriah (2020) mengenai Belanja Pemerintah, yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian Rangkuty *et al.* (2022) yang mengindikasikan bahwa Belanja Daerah atau pemerintah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Mengenai Pendapatan Asli Daerah, Rangkuty *et al.* (2022), Subagia & Utama (2022), serta Nurhabibah *et al.* (2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki efek yang signifikan pada indeks pembangunan manusia. Ini bertolak belakang dengan temuan Rosmadayanti *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memengaruhi indeks pembangunan manusia.

Penelitian lain tentang Tingkat Pengangguran yang dilakukan oleh Kasnelly & Wardiah (2021), Ningrum *et al.* (2020), dan Ranadhani *et al.* (2021) mengungkapkan Tingkat Pengangguran memengaruhi indeks pembangunan manusia secara signifikan, namun pada studi yang dilakukan Safitri *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa pengangguran tidak memberi pengaruh signifikan pada perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Banyak studi hanya meneliti pengaruh satu variabel atau dua variabel saja. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan pembaruan untuk menganalisis tiga variabel berpengaruh yakni, belanja pemerintah daerah, PAD, dan tingkat pengangguran terhadap IPM.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori tentang pertumbuhan ekonomi saat ini, terutama Teori Pertumbuhan Endogen, menekankan bahwa faktor-faktor internal dalam ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi jangka panjang. Hal-hal seperti investasi dalam modal manusia, inovasi teknologi, dan kebijakan publik yang baik sangat berperan dalam hal ini. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah memainkan peranan yang penting dalam menyediakan layanan publik yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori pertumbuhan endogen juga menyoroti pengangguran sebagai hambatan terhadap proses pembangunan.

## 2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Pusat Statistik Badan (2021) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang menggabungkan berbagai aspek untuk menilai kemajuan dalam kualitas hidup manusia. Menurut United Nations Development Programme (2024) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran paling komprehensif untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia yang mencakup tiga aspek utama: pendidikan, standar hidup yang layak, dan kesehatan, dengan demikian IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan pemerataan hasil pembangunan. IPM juga menunjukkan peta capaian pembangunan manusia di berbagai daerah melalui kategori: sangat tinggi (lebih dari 80), tinggi (70 – 79,9), sedang (60 – 69,9), dan rendah (kurang dari 60). [13].

## 2.3. Belanja

Berdasarkan Mardiasmo (2021), belanja daerah mencakup semua biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah, dan ini menunjukkan pengurangan pada kekayaan bersih dalam satu periode anggaran, belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan belanja daerah sebagai instrumen fiskal utama untuk mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan. Belanja pemerintah daerah terdiri dari; belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja tranfer.

## 2.4. Pendapatan Asli Daerah

Definisi dari pendapatan asli daerah menurut UU No.23 Tahun (2014) adalah semua penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari kegiatan ekonomi lokal, dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh hukum. Pendapatan asli daerah terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki kemandirian dalam hal keuangan. Semakin besar pendapatan asli daerah maka daerah semakin leluasa dalam menentukan prioritas pembangunannya.

## 2.5. Tingkat Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran penting untuk melihat seberapa banyak tenaga kerja yang belum bergabung dengan pasar kerja, dan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja yang ada belum berjalan secara maksimal. Tingkat pengangguran mencerminkan situasi perekonomian di suatu negara atau wilayah, apakah berada dalam fase pertumbuhan, perlambatan, atau bahkan mengalami kemunduran.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 kab/kota. Jumlah populasi sebanyak 105 ini diperoleh dari 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tiga tahun yaitu 2021 sampai 2023. Sampel menggunakan sampling total (*census*) dimana populasi digunakan untuk sampel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang diperoleh melalui *website* resmi DJPK dan BPS. Metode analisis yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji F, Uji t, dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
BELANJA	105	932,07	5340,47	2322,0750	747,85804
PAD	105	240,96	2835,15	485,7141	385,46556
PENGANGGURAN	105	1,76	9,97	5,3614	1,94724
IPM	105	66,64	84,99	73,6464	4,29752
Valid N (listwise)	105				

Sumber: *Output SPSS 25*

- Variabel Belanja (X1) memiliki nilai *mean* sebesar 2.322,0750 dengan deviasi standar 747,85804. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah-daerah.
- Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) memiliki nilai *mean* sebesar 485,7141 dengan nilai standar deviasi 385,46556, ini membuktikan adanya variasi yang besar antar daerah.
- Variabel Tingkat Pengangguran (X3) memiliki nilai *mean* sebesar 5,3614 dengan standar deviasi 1,94724, hal ini menunjukkan adanya penyebaran data yang cukup besar.
- Variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) memiliki nilai *mean* sebesar 73,6464 dengan standar deviasi 4,29752, ini menunjukkan bahwa sebaran IPM antar daerah relatif sama atau tidak jauh berbeda, meskipun terdapat perbedaan signifikan.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,94656466
Most Extreme Differences	Absolute	0,065
	Positive	0,065
	Negative	-0,054
Test Statistic		0,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 sehingga lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi secara normal.

### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	BELANJA	0,435	2,298
	PAD	0,424	2,356
	PENGANGGURAN	0,917	1,091

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

### 4.2.3 Uji Autokorelasi

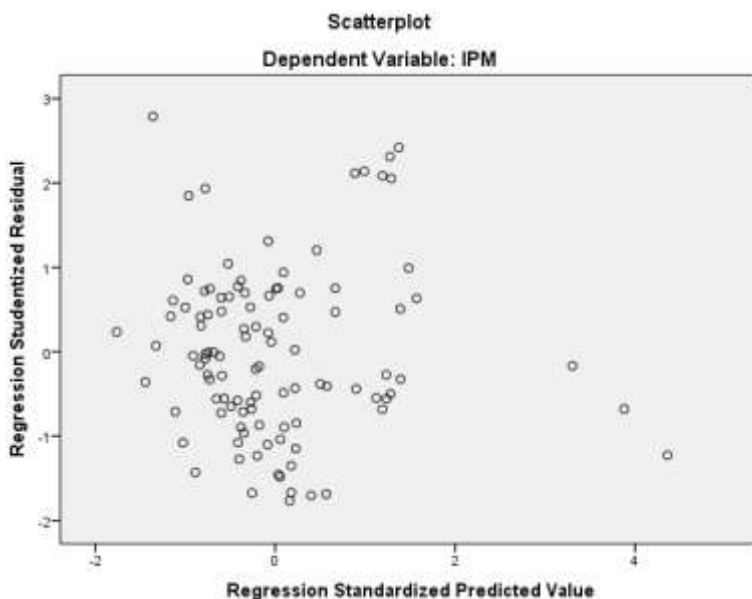
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	2,99001	2,035

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan tabel di atas, nilai dari uji Durbin-Watson adalah 2,035. Dengan jumlah data sebanyak 105 dan tiga variabel independen, didapatkan batas bawah (DL) sebesar 1,6433 dan batas atas (DU) sebesar 1,7411. Angka DW terletak di antara kedua batas tersebut, yaitu  $1,7411 < 2,035 < 2,2589$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi autokorelasi.

4.2.4 Uji Heterokestisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa, tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka bisa dinyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized		Standardized
		Coefficients		Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	80,440	1,273	
	BELANJA	- 0,005	0,001	- 0,884
	PAD	0,012	0,001	1,111
	PENGANGGURAN	- 0,189	0,157	- 0,086

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui hasil analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia} = 80,440 - 0,005 \text{ belanja} + 0,012 \text{ PAD} - 0,189 \text{ pengangguran} + e$$

Dari persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstan ( $\alpha$ ) sebesar 80,440 artinya tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun maka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,440.
- Jika nilai koefisien regresi dari Belanja Pemerintah (X1) sebesar - 0,005 yang artinya jika variabel Belanja Pemerintah (X1) bertambah satu satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,005 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
- Jika nilai koefisien regresi dari Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar 0,012 yang artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) bertambah satu satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,012 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
- Jika nilai koefisien regresi dari Tingkat Pengangguran (X3) sebesar - 0,189 yang artinya jika variabel Tingkat Pengangguran (X3) bertambah satu satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,189 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

#### 4.4 Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1017,787	3	339,262	37,948	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	902,953	101	8,940		
	Total	1920,740	104			

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $37,948 > F$  tabel  $2,6937$ , maka hasilnya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Tingkat Pengangguran (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) dan model regresi sudah baik dan layak digunakan.

#### 4.5 Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	63,213	0,000
	BELANJA	-8,547	0,000
	PAD	10,607	0,000
	PENGANGGURAN	-1,200	0,233

Sumber: *Output SPSS 25*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai  $df_1 = 3$  dan nilai  $df_2 = 102$  dengan nilai signifikan  $0,05$  dan t tabel adalah  $1,984$ .

- Belanja Pemerintah (X1) nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai t hitung  $8,547 > 1,984$ , maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).
- Pendapatan Asli Daerah (X2) nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai t hitung  $10,607 > 1,984$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).
- Tingkat Pengangguran (X3) nilai signifikansi sebesar  $0,233 > 0,05$  sedangkan nilai t hitung  $1,200 < 1,984$ , maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

#### 4.6 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,728 <sup>a</sup>	0,530	0,516

Sumber: *Output SPSS 25*

Tabel diatas menunjukkan bahwa Adjusted R Square memiliki nilai  $0,516$ . Ini berarti bahwa Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pengangguran memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar  $51,6\%$ , sementara variabel lain berkontribusi sebesar  $48,4\%$ .

#### 4.7 Pembahasan

##### 4.7.1 Pengaruh Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai signifikan lebih kecil dari tingkat koefisien yaitu  $0,000 < 0,05$  serta nilai t hitung  $8,547 > t$  tabel  $1,984$ . Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan Belanja Pemerintah akan menyebabkan penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia, begitupun sebaliknya setiap penurunan satu satuan Belanja Pemerintah menyebabkan kenaikan

pada Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah tidak selalu berdampak positif terhadap pembangunan manusia apabila tidak didukung oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemungkinan alokasi belanja yang belum optimal atau belum tepat sasaran ke sektor sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti belanja pegawai yang terlalu besar dibandingkan belanja modal hal itu dapat mengurangi dampak positif belanja terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmadayanti *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangkuty *et al.* (2022) yang menyatakan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

#### **4.7.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai signifikan lebih kecil dari tingkat koefisien yaitu  $0,000 < 0,05$  serta nilai  $t$  hitung  $10,607 > t$  tabel  $1,984$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah akan menyebabkan kenaikan pada Indeks Pembangunan Manusia, begitupun sebaliknya setiap penurunan satu satuan Pendapatan Asli Daerah menyebabkan penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagia & Utama (2022), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmadayanti *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **4.7.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai signifikan lebih besar dari tingkat koefisien yaitu  $0,233 > 0,05$  serta nilai  $t$  hitung  $1,200 < t$  tabel  $1,984$ . Hal ini menunjukkan Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan ataupun penurunan satu satuan Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini karena IPM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita, bukan langsung dipengaruhi oleh status bekerja atau tidaknya seseorang. Banyak masyarakat yang bekerja disektor informal tidak tercatat secara resmi sebagai pekerja, sehingga meskipun data menunjukkan pengangguran tinggi, mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, berbagai program bantuan sosial dari pemerintah seperti kartu indonesia pintar dan kartu indonesia sehat turut membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meskipun tidak memiliki pekerjaan formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasnelly & Wardiah (2021) menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan terkait pengaruh Belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; Belanja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian. Sedangkan Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian.

Adapun saran penulis bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan data dengan cakupan jangka waktu yang lebih panjang ataupun menambahkan variabel yang lebih relevan agar dapat menggambarkan/menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia secara lebih menyeluruh. Kemudian untuk area penelitian sebaiknya lebih diperluas lagi atau membandingkan dengan area yang berbeda agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan memberikan pemahaman yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] United Nations Development Programme, *Report 2023 / 2024 Reimagining cooperation in a polarized world*. 2024.
- [2] Badan Pusat Statistik Jateng, “Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024,” 2024.
- [3] I. A. Sutono, D. J. Perbendaharaan, and K. Keuangan, “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau,” *J. Manaj. Perbendaharaan*, vol. 3, no. 2, pp. 150–168, 2022, doi: 10.33105/jmp.v3i2.463.
- [4] D. Rosmadayanti, N. Imaningsih, and R. S. Wijaya, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur,” *J. Syntax Admiration*, vol. 2, no. 8, 2021.
- [5] A. Setiawan and Fikriah, “Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia,” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Pembang. Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Syiah Kuala*, vol. 5, no. 4, pp. 212–221, 2020, [Online]. Available: <http://eprint.stieww.ac.id/1110/1/22> Rolanda Aisha Hidarini dan Andy Dwi Bayu Bawono.pdf
- [6] D. M. Rangkuty, M. Yusuf, R. A. Pasaribu, P. Universitas, P. Panca, and I. Artikel, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara,” *J. Ilm. Ekon. dan Pembang.*, vol. 11, pp. 41–52, 2022.
- [7] I. G. N. K. A. Subagia and M. S. Utama, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Ipm Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020,” *E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 11, no. 12, p. 1538, 2022, doi: 10.24843/eeb.2022.v11.i12.p10.
- [8] A. Nurhabibah, A. Boedirochminarni, and N. P. Sari, “Pengaruh PAD dan Angkatan Kerja Terhadap IPM Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019,” *J. Ilmu Ekon. JIE*, vol. 6, no. 1, pp. 26–40, 2022, doi: 10.22219/jie.v6i1.19406.
- [9] S. Kasnelly and J. Wardiah, “Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia,” *JALAKOTEK J. Account. Law Commun. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 590–597, 2021, doi: 10.57235/jalakotek.v1i2.2555.
- [10] J. W. Ningrum, A. H. Khairunnisa, and N. Huda, “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam,” *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 2, p. 212, 2020, doi: 10.29040/jiei.v6i2.1034.
- [11] A. Ranadhani, A. G. Kumenaung, and K. D. Tolosang, “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2019,” *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 21, no. 02, pp. 228–239, 2021.
- [12] A. D. Safitri, E. P. Vrasetya, and M. L. Rohmi, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung,” *J. Bisnis, Ekon. Syariah, dan Pajak*, vol. 1, no. 2, pp. 13–27, 2024, doi: 10.61132/jbep.v1i2.109.
- [13] Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia 2020,” vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2021, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>
- [14] Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah : Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” vol. 1, no. 22 Jan, pp. 1–17, 2014.
- [16] Badan Pusat Statistik, “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021,” vol. 19, no. 37, pp. 1–28, 2021.